

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A, Qirom. (2019). *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- A.Rahim. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Jakarta.
- Abas, M., & C itra, H. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adler Haymans Manurung. (2006). *Dasar-Dasar Investasi Obligasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Amiruffin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung. (2013). *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. (2015). *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung.

Marzuki, Usman. (1997). *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Institusi Bankir Indonesia, Jakarta.

Mediya Lukman. (2018). *Keuangan Korporat ,Teori dan Praktik di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode&Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.

Ronny Hanitijo Soemitro. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S. (2004). *Hukum perjanjian: teori dan analisa kasus*. Indonesia: Kencana.

Satrio, J. (1992). *Perjanjian Pada Umumnya*. CV Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Hermuningsih. (2019). *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Upp Stim Ypkn, Yogyakarta.

Suharkono. (2014). *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta

Syahmin AK. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Romli Atmasasmita. (2021). *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

Arianto, E., & Andri, A. (2020). Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Nomor 10/Pdt. G/2017/Pn. Slk. *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, 5(2), 9-18.

- Batis, B. (2022). Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung).
- Bawarith, R. H., Nurdin, A. R., & Adli, M. (2024). Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 216/Pdt/2022/Pt Pdg). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18231-18243.
- Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 464-485.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01)
- Marweny, E., Citra, H., & Wahyuni, S. (2022). Urgensi Diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Dan Sejumlah Peraturan Lainnya Di Daerah Terkait Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm). *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 281-287.
- Nasrullah, A. (2015). Studi surat berharga negara: Analisis komparatif sukuk negara dengan obligasi negara dalam pembiayaan defisit APBN. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 13(2), 152-168
- Pakpahan, E. F. (2009). Analisis Hukum terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Prasetyo, F. Klaim Obligasi Negara Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Putusan Nomor 158/Pdt. G/2021/Pn. Pdg) (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163-182.

Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163-182.

Rafasya, R., & Marweny, E. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Padang. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 32-41.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang- Undang No 24 tahun 2002, pasal 1 surat utang negara

Undang-Undang No 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Lain-lain

Pembeli Obligasi Pemerintah pada 1950, Kompas.com. diakses dari

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/30/061200878/cerita-2-pembeli-obligasi-pemerintah-pada-1950-nyak-sandang-dan-penggugat?page=all>

Putusan Pengadilan Negeri Padang No 158/PDT.G/2021/PN.Pdg.

Visi Misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Diakses dari <https://kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id/PUI/misi>

Wawancara dengan ibu Chadijah dan Ibu Devi selaku jaksa pengacara negara